

PEMODELAN SKENARIO KEBIJAKAN PENGENTASAN KEMISKINAN DI INDONESIA DENGAN METODE PROMETHEE

Nafiah Ariyani
nafiah_ariyani@yahoo.com
Universitas Sahid Jakarta

ABSTRACT

One of the challenging issues in poverty alleviation programs is to determine the set of multi criteria which encompass aspect of inputs, process and output that yield the best alternative program. This is important due to the fact that poverty is multidimensional issue and criteria to be considered in the program are vary. This study aimed to address a challenge by employing a mutli-criteria analysis. PROMETHEE was used to assess existing various poverty alleviation patterns. In addition, a new set of policy alternative, namely a hybrid policy was introduced in order to compare with existing policies. The results show that zakat patterns performs well in terms of time to eradicate poverty, the completeness of the program, accuracy of the target, recipient satisfactory, satisfactory of the admission process, data availability, and cost management. In contrast, CSR patterns perform well in management aspect, cost of management, data availability and satisfactory for the time of delivery program, while the pattern of government programs excel in aspects: the completeness of the program and the availability of funds. Overall, the newly introduced policy of hybrid program offers the best performance for all aspect of input, process and output in administering the poverty alleviation programs.

Key words: poverty alleviation, hybrid program, PROMETHEE

ABSTRAK

Salah satu tantangan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan adalah mengembangkan program yang bersifat multidimensi baik dari sisi input, proses dan output yang akan menghasilkan alternatif kebijakan pengentasan kemiskinan terbaik. Hal ini penting mengingat kemiskinan adalah masalah multidimensi dan kriteria yang harus dipertimbangkan bervariasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi tantangan tersebut dengan menerapkan analisis mutli-kriteria pada kriteria input, proses dan output. Metode PROMETHEE (*Preference Ranking Organization Methode for Enrichment Evaluation*), digunakan untuk menilai berbagai pola program pengentasan kemiskinan yang dikembangkan oleh pemerintah, lembaga zakat dan sektor swasta. Selain itu, satu alternatif kebijakan baru, yaitu kebijakan hibrida diperkenalkan untuk dibandingkan dengan kebijakan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola program zakat mempunyai kinerja yang baik dalam aspek waktu yang diperlukan untuk memberantas kemiskinan, kelengkapan program, ketepatan sasaran, kepuasan terhadap waktu penerimaan program, kepuasan terhadap proses penerimaan program, ketersediaan data, serta biaya pengelolaan. Sebaliknya, program pengentasan kemiskinan yang diprakarsai oleh sektor swasta, yaitu CSR tampil baik dalam aspek manajemen, biaya pengelolaan, ketersediaan data serta kepuasan terhadap waktu penyerahan program; sedangkan pola program pemerintah unggul dalam aspek: kelengkapan program dan ketersediaan dana. Secara keseluruhan, kebijakan baru yang diperkenalkan yaitu pola program hibrida menawarkan kinerja terbaik pada seluruh aspek pengelolaan program pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: pengentasan kemiskinan, hibrida, PROMETHEE

PENDAHULUAN

Kemiskinan terus menjadi agenda pembangunan berkelanjutan/SDGs (*Sustainable*

Development Goals) yang merupakan kelanjutan dari MDGs (*Millineum Development Goals*). Hal ini menunjukkan bahwa pem-

berantasan kemiskinan masih menjadi kesepakatan sebagian besar negara-negara di seluruh dunia. Demikian pula Indonesia.

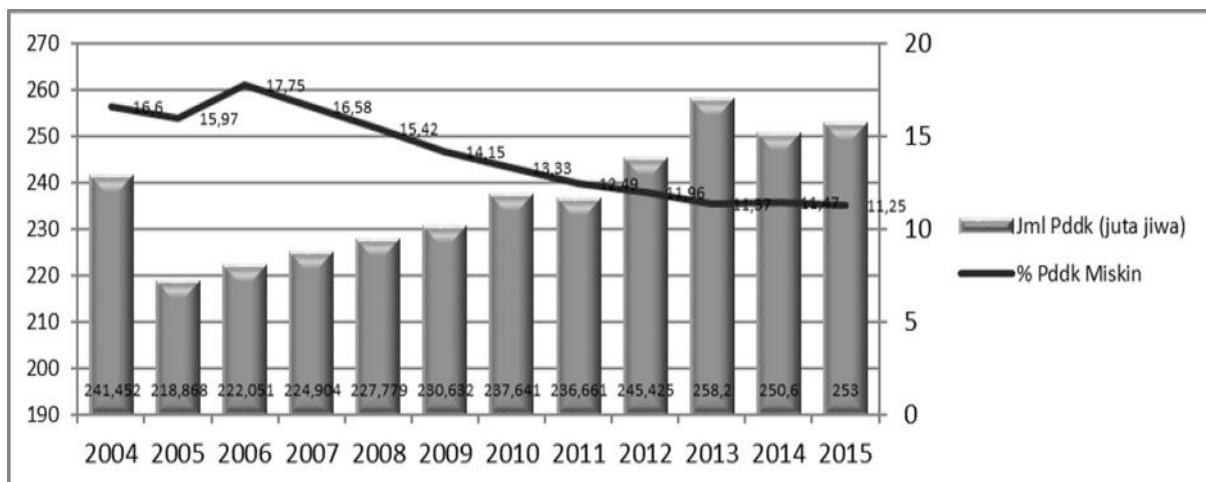
Kemiskinan di Indonesia merupakan permasalahan yang cukup pelik. Meskipun ekonomi tumbuh dan berkembang selama beberapa tahun terakhir dan berbagai langkah kebijakan pengurangan kemiskinan telah dilakukan, namun nampaknya belum membuahkan hasil yang signifikan. Target-target kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintahpun hampir tidak pernah tercapai. Kemiskinan tetap menjadi masalah sosial yang paling *persistence* yang sulit ditanggulangi sebagaimana kemiskinan “abadi” yang terjadi di Afrika (Korankye, 2014).

Gambar 1 menunjukkan kondisi kemiskinan dan perubahannya selama 10 tahun terakhir di Indonesia. Jika dilihat dari prosentase, jumlah penduduk miskin memang mengalami penurunan, namun dengan pengurangan yang cenderung menurun dan melambat sehingga secara nyata jumlah penduduk miskin tetap meningkat. Rata-rata penurunan jumlah penduduk miskin selama kurun waktu ini hanya sebesar 0,56% per tahun. Data pada tahun 2015 bahkan mencatat jumlah penduduk miskin pada Maret 2015 meningkat menjadi 11,22% dari total penduduk (28,59 juta jiwa), yang

berarti mengalami penambahan dibanding September 2014 yang sebesar 10,96% (27,737 juta jiwa) ((BPS, 2015). Jumlah kemiskinan itupun masih menggunakan kategori garis kemiskinan dari pendapatan kurang US\$ 1 per hari. Jika perhitungan menggunakan standar Bank Dunia yakni pendapatan US\$ 1,9 per hari, maka jumlah penduduk miskin akan mencapai 42% atau hampir 100 juta jiwa.

Kemiskinan tidak hanya menggambarkan keadaan ketidakmampuan dan ketidakberdayaan individu dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, namun juga merupakan suatu proses yang kompleks dengan banyak dimensi, mulai dari aspek ekonomi, sosial maupun budaya. Dilihat dari dinamikanya, kemiskinan dapat sementara, namun jika dibiarkan akut dapat menjadi persisten dan menjebak generasi penerus.

Dasgupta (2007) menyatakan kemiskinan adalah suatu jalur berlumpur berbentuk spiral, ketika seseorang atau suatu keluarga masuk ke jalur itu maka akan sulit keluar bahkan cenderung merosot ke bawah. Untuk menangani permasalahan yang multi dimensional ini diperlukan upaya yang berkelanjutan yang didukung oleh kebijakan yang komprehensif meliputi aspek input, proses dan output.



Gambar 1
Jumlah Penduduk Miskin, Proporsi Penduduk Miskin dan Target Penduduk Miskin 2004-2015

Sumber: www.bps.go.id dan situs www.datastatistik-indonesia.com

Dengan pendekatan ini, maka penanggulangan kemiskinan akan mampu membawa orang miskin keluar dari kemiskinannya, yang ditunjukkan oleh kemampuannya dalam menyelesaikan permasalahannya secara mandiri tanpa tergantung pihak lain.

Di Indonesia, upaya mengatasi kemiskinan telah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 1970-an hingga saat ini melalui berbagai program baik yang bersifat bantuan sosial maupun yang bersifat pemberdayaan masyarakat. Upaya-upaya untuk mengatasi masalah sosial ekonomi ini juga dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kepedulian terhadap kemiskinan. Salah satunya adalah lembaga zakat. Sebagai negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia, potensi zakat di Indonesia mencapai Rp.217 triliun per tahun dengan peningkatan rata-rata 10% (Mubarok dan Fanani, 2014). Zakat telah menjadi alternatif terbaik dalam mengatasi kemiskinan dan kesenjangan sebagaimana hasil penelitian Ariyani *et al.* (2015) dan Bremer, 2013 sebagaimana dikutip oleh Ariyani *et al.* (2016) Zakat tidak hanya sekedar sarana untuk memperbaiki kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin, tetapi juga menjadi sistem dan mekanisme untuk mengatur ketidaksetaraan ekonomi dan sosial yang kontinyu.

Lembaga zakat di Indonesia baik yang beraviliasi kepada pemerintah seperti Baznas (Badan Amil Zakat Nasional) beserta jajarannya di daerah (Bazda) maupun lembaga-lembaga zakat swasta, melalui pen-dayagunaan zakat telah berkontribusi cukup besar dengan melakukan pengembangan program-program yang sangat variatif dan inovatif.

Pihak lain yang juga terlibat dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia adalah sektor swasta melalui program *corporate social responsibility* (CSR). CSR merupakan umpan balik kepada masyarakat sehubungan dengan aktifitas perusahaan yang tidak jarang menjadi pemicu munculnya kemiskinan. Gagasan bahwa perusaha-

an harus memikul tanggung jawab di luar kepentingan *stakeholders* adalah konsep lama dan menuntut komitmen yang tinggi (The Economist, 2008). Jika dikelola dengan tepat CSR akan memungkinkannya bertransformasi menjadi CCR (Corporate Community Resource Responsibility) yang menjadi dasar terbangunnya tanggung jawab pembangunan ekonomi masyarakat (CEE-Community Economic Responsibility) (Fauzi, 2012). Berdasarkan pada pemikiran ini, CSR dapat menjadi model yang tepat dalam pengembangan kemampuan ekonomi sosial masyarakat, khususnya masyarakat lokal di sekitar perusahaan.

Konfigurasi keterlibatan pihak-pihak dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia menunjukkan adanya komitmen sosial yang sangat baik, maka jika ide dan program-program pengentasan kemiskinan benar-benar disusun dan dieksekusi dengan komitmen yang tinggi disertai dengan pengelolaan yang tepat, maka pemberantasan kemiskinan akan mungkin terwujud, namun dikarenakan lemahnya koordinasi di antara pihak-pihak tersebut, maka program-program sangat variatif dan pada aspek pelaksanaan memunculkan berbagai permasalahan.

Berbagai hasil penelitian terdahulu diantaranya menyatakan bahwa pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Indonesia tidak koordinatif, masing-masing pihak berjalan sendiri-sendiri, tidak komprehensif dalam memenuhi kebutuhan orang miskin yang serba kekurangan, masih berorientasi kepada bantuan sosial serta tidak berkelanjutan. Beberapa penelitian bahkan mengatakan terjadi tumpang tindih (*overlapping*) antar program, ego sektoral, ambiguitas, tidak terpadu, tidak merata, memicu konflik struktural maupun konflik horizontal di kalangan masyarakat, serta parsial baik dalam: program, aturan, acuan, kriteria penerima manfaat, maupun pengelolaannya (Dolles, 2010; Muktasam dan Nurjannah, 2011; Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM, 2014).

Berdasarkan berbagai permasalahan di atas, maka sangat bijak sekiranya dapat dirancang suatu upaya terpadu yang melibatkan pihak-pihak tersebut secara konsisten yang didukung oleh koordinasi yang memadai. Tujuannya tidak lain adalah agar seluruh potensi dan sumber daya dapat dimanfaatkan secara efektif dan efisien. Untuk itu dapat dipertimbangkan kemungkinan dikembangkannya pola penanggulangan kemiskinan dengan model *hybrid* yaitu model kombinasi antara pola program pemerintah, pola zakat dan pola CSR sebagai representasi dari upaya terpadu tersebut.

Ide model *hybrid* merupakan ide yang relatif baru. Agar terdukung oleh argumentasi ilmiah, maka ide ini perlu dievaluasi untuk dibandingkan dengan pola program-program eksisting. Salah satu pendekatan adalah dengan melakukan perbandingan pemeringkatan terhadap pola program-program eksisting dan pola model *hybrid* sehingga diketahui mana pola yang merupakan pola terbaik. Pola program terbaik nantinya dapat ditetapkan sebagai *raw model* pola program pengentasan kemiskinan dalam menghadapi kemiskinan yang *persistence*.

Berdasarkan urian permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menentukan pola program terbaik di antara pola program pemerintah, pola program zakat, pola program CSR dan pola model *hybrid*; (2) mengetahui atribut-atribut yang menjadi sumber keunggulan pola program-program tersebut. Untuk mendukung proses pemeringkatan dan memberikan analisis lebih rinci baik terhadap program-program eksisting maupun program model *hybrid* digunakan kaidah sains yakni melalui pendekatan *multi criteria analysis* dengan menggunakan metode PROMETHEE (*Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation*) yang dikembangkan oleh Brans dan Vincke (1985). Metode Promethee merupakan metode yang banyak digunakan untuk mengkaji secara mendalam potensi alternatif-alternatif melalui prinsip yang disebut *outranking*, yaitu proses pemeringkat-

an alternatif-alternatif melalui perbandingan nilai dengan mempertimbangkan preferensi pengambil keputusan (Brans *et al.* 1986). Metode PROMETHEE semakin banyak diminati dalam praktek keputusan multi-kriteria dan peneliti yang tertarik pada aspek sensitivitas karena praktis dan fleksibel (Behzadian *et al.* 2010).

TINJAUAN TEORETIS

Kemiskinan dan Kerangka Kebijakan Pengentasan Kemiskinan

Kemiskinan dapat didefinisikan melalui berbagai perspektif. Menurut Komisi Hak Asasi Manusia PBB, kemiskinan dapat dinyatakan dalam tiga cara yang berbeda Sarshar, 2010 sebagaimana dikutip oleh Khan (2014). Pertama, kemiskinan adalah situasi di mana terjadi kelangkaan fasilitas penting akibat dari pendapatan yang tidak memadai. Kedua, kemiskinan terjadi karena kegagalan memenuhi kebutuhan dasar. Ketiga dan yang lebih modern, kemiskinan menggambarkan kurangnya kesempatan. Dari sisi pengukuran, kemiskinan umumnya diukur sebagai kemiskinan absolut atau relatif. Kemiskinan absolut mengacu pada standar garis kemiskinan yang ditetapkan konsisten dari waktu ke waktu dan antar negara. Bank Dunia sejak 2008 mendefinisikan kemiskinan sebagai hidup kurang dari US \$1,9 perhari, sedangkan kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang pengukurannya didasarkan pada pemerataan distribusi pendapatan.

Kajian secara luas terhadap kemiskinan telah dilakukan oleh berbagai kalangan baik akademisi, ekonom bahkan politisi, namun hingga saat ini belum ditemukan suatu rumusan kebijakan dan program yang dianggap paling berdayaguna, demikian pula teori yang membahas hal tersebut. Diantara sedikitnya teori dan konsep kebijakan pengentasan kemiskinan, Bradshaw (2007) menyatakan bahwa penyusunan kebijakan pengentasan kemiskinan memerlukan kajian komprehensif terhadap berbagai faktor yang menentukan keberhasilannya, yang

meliputi aspek: pelaku, proses, evaluasi serta dasar teori yang relevan.

Menurut Rank dalam Sameti *et al.* (2012) memahami konsep dan penyebab sebenarnya dari kemiskinan penting dan sangat berguna dalam merancang program pengentasan kemiskinan yang efektif. Menurutnya penyebab kemiskinan dapat dikelompokkan dalam empat faktor utama, yaitu: faktor individu, budaya, lingkungan, dan struktural. Sementara itu Schiller (2008), Laderchi, Saith dan Stewart, 2003 dalam Sameti *et al.* (2012) menyatakan cara kita mengkonsep dan mengukur kemiskinan akan mempengaruhi dalam merancang kebijakan dan program pengentasan kemiskinan.

Kebijakan pengentasan kemiskinan yang efektif memerlukan penjabaran yang lebih operasional dalam bentuk program. Terhadap hal ini Dasgupta (2007) menyatakan bahwa desain program pengentasan kemiskinan yang tepat harus memenuhi kriteria berikut: (1) spesifik, artinya suatu program tidak cocok untuk segala situasi dan harus disesuaikan dengan institusi lokal, (2) relevan dengan permasalahan, (3) berbasis sumber daya lokal, (4) memahami konsekuensi yang tidak diinginkan atas pelaksanaan suatu program, (5) didasari oleh kesadaran bahwa kemiskinan adalah suatu situasi sebab akibat, tidak berdiri sendiri.

Chambers *et al.* sebagaimana dikutip oleh Muktasam dan Nurjannah (2011) menyatakan keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat ditentukan oleh: (1) kesadaran terhadap nilai-nilai lokal, (2) pendekatan yang terintegrasi dan menyeluruh, serta (3) bersifat pengembangan sumberdaya manusia. Sedangkan faktor-faktor penyebab kegagalan program adalah: (1) pendekatan 'target' dan 'top-down'; (2) bias 'outsiders'; (3) kurangnya partisipasi; (4) pendekatan yang tidak holistik; dan (5) ilusi investasi. Lebih mendasar Bradshaw (2007) menyatakan membantu orang miskin penekanannya adalah kepada penyediaan dukungan dan layanan yang menyeluruh

untuk mencapai "swasembada", sehingga mampu melahirkan kemandirian bagi penerimanya.

Pramanik dalam Hasan dan Khan (2007) menyatakan, agar berhasil, kebijakan dan program pengentasan kemiskinan perlu didukung dengan strategi yang tepat. Terdapat dua jenis strategi yang dapat diterapkan dalam kebijakan pengentasan kemiskinan, yaitu: (a) strategi tidak langsung yang berupa kebijakan makro untuk menjamin pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, menyediakan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan per kapita dan mengurangi kemiskinan, dan (b) strategi langsung, yang merupakan kerangka kebijakan mikro berupa penyediaan bantuan yang diperlukan oleh penduduk miskin. Keterpaduan dua strategi ini akan melahirkan kebijakan anti kemiskinan yang efektif.

Zakat dan Pengentasan Kemiskinan

Zakat adalah mekanisme distribusi kekayaan dari orang kaya kepada orang miskin yang didukung oleh kewajiban agama. Menurut Bremer, 2013 dalam Ariyani *et al.* (2016), struktur zakat secara eksplisit mendorong terjadinya kesetaraan dan keadilan sosial melalui kedua ujung spektrum pendapatan. Di ujung atas, zakat berfungsi untuk mencegah *overconcentration* dan akumulasi kekayaan yang berlebihan melebihi kebutuhan keluarga pada keluarga-keluarga mampu, sedang pada ujung bawah, zakat menentukan kategori pada populasi masyarakat yang membutuhkan dan seharusnya menerima bantuan. Dalam tatanan sistem ekonomi yang berlaku saat ini zakat menjadi sistem nilai yang berperan dalam mengatasi permasalahan distribusi pendapatan selain pajak dan transfer. Zakat juga merupakan sistem penggerak ekonomi yang akan menginisiasi masyarakat untuk mengelola sumber daya yang dimilikinya dalam mencapai taraf kehidupan yang lebih baik (Damilola, 2015).

Kewajiban mengeluarkan zakat tidak pernah usang baik dari sisi waktu maupun kondisi masyarakat. Kewajiban tersebut

tetap harus dilaksanakan meskipun para penerima zakat telah sejahtera. Konsepsi ini menjadikan zakat sebagai aset dan "dana abadi" yang sangat potensial untuk memerangi kemiskinan (Ali, 2010).

Al-Qardawi dalam Ali (2010) menyatakan pembayaran zakat yang dilakukan oleh seseorang secara tidak langsung akan memberi kebaikan terhadap pembayar zakat itu sendiri, diantaranya perasaan bahagia, yang menurut Andreoni perasaan bahagia ketika memberi disebut *warm glow* sebagaimana dikutip oleh List (2011).

Ali (2010) menyatakan zakat dapat meningkatkan *aggregate demand* dan meningkatkan *capital stock* yang pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam konteks makro zakat memberi efek terhadap akumulasi kapital melalui peningkatan rasio modal tenaga kerja, meningkatkan potensi ekonomi dan sosial bagi para penerimanya. Untuk itu upaya mentransformasikan zakat dari sebatas nilai dan kewajiban religius menjadi salah satu instrumen pembangunan ekonomi perlu dilakukan guna mencapai kemakmuran bagi seluruh masyarakat.

Peran Sektor Swasta dalam Pengentasan Kemiskinan

Sektor swasta dapat berperan penuh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. (Dobers dan Halme, 2009) Peran tersebut dapat diwujudkan dengan berinvestasi dalam lingkungan sesuai dengan kebijakan bisnis dan kesadaran untuk melaksanakan tanggung jawab kepada seluruh *stakeholder*. Carroll (1979) sebagaimana dikutip oleh Sharma dan Kiran (2013) menyatakan tanggung jawab sosial bisnis meliputi ekspektasi dalam aspek ekonomi, hukum, etika serta organisasi. Pemikiran ini telah melahirkan konsep *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

The World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) mendefinisikan CSR sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi berkelanjutan, melalui kerjasama dengan para karyawan serta

perwakilan mereka, keluarga, komunitas setempat maupun masyarakat umum untuk meningkatkan kualitas kehidupan dengan cara yang bermanfaat. CSR mempunyai potensi dalam mengurangi dampak negatif keberadaan bisnis terutama dalam mengatasi persoalan kemiskinan yang kompleks ini.

Model Kelembagaan Hybrid

Semakin terlibatnya masyarakat dan sektor swasta dalam penanganan permasalahan-permasalahan publik memerlukan tata kelola yang lebih baik untuk memfasilitasi berbagai perbedaan yang ada dalam sektor pemerintah, swasta dan masyarakat. Williamson, 1991 sebagaimana dikutip oleh German (2010) menyatakan bahwa model kelembagaan pemerintah dan swasta berbeda. Model pemerintah sangat *regulated*, terstruktur, dengan aktifitas yang direncanakan (*intentional ordering*), sementara model swasta dicirikan dengan fleksibel dan *spontaneous*. Untuk mengatasi perbedaan di antara ke dua model tersebut serta dalam meningkatkan efektivitas peran masing-masing lembaga, Williamson menyarankan untuk mengkombinasikan keduanya. Model kelembagaan kombinasi ini disebut model *hybrid*.

Altman dan Cochrane (2003) dalam Russell (2011) menyatakan model *hybrid* merupakan model kelembagaan yang tepat dalam mengatasi permasalahan yang kompleks dimana banyak aktor terlibat, melalui kemampuannya dalam meningkatkan koordinasi dan interdependensi. Hal ini terjadi karena pengaturan model *hybrid (hybrid arrangement)* akan menjadikan sumber daya terkumpul (*pooled resources*) sehingga potensi untuk terselesaikannya permasalahan semakin baik (Menard dan Shirley, 2014).

Menurut Elsner (2004) dalam Proff (2015) model *hybrid* akan memfasilitasi terjadinya *collective learning* di antara berbagai institusi yang rendah dalam koordinasi dan kerjasama. German (2010) menyatakan dengan menerapkan model *hybrid* maka interdependensi antar lembaga akan

muncul melalui koordinasi dan kerjasama yang intensif tanpa menghilangkan otonomi masing-masing. Pemahaman tentang peran dan pendekatan yang koordinatif dalam model *hybrid*, mendorong pihak-pihak dapat membuat kemajuan yang realistis dalam menghadapi kompleksnya tugas-tugas (Mc Kague *et al.* 2015). Pache dan Santos (2013) menyatakan strategi hibrida memungkinkan legitimasi kepada para pemangku kepentingan eksternal tanpa harus terlibat dalam negosiasi yang mahal. Inisiatif penerapan model *hybrid* dalam pengembangan kebijakan penanggulangan kemiskinan akan melahirkan program-program komprehensif, berjangka panjang, berkelanjutan dan berfokus pada hasil.

Metode PROMETHEE

PROMETHEE adalah salah satu metode pembuatan keputusan multikriteria yang semakin populer digunakan oleh peneliti (Keyser dan Peeters, 1996). Metode ini menggunakan konsep *outranking* (urutan) sebagai dasar pengambilan keputusan, dimana urutan ditetapkan berdasarkan prinsip apakah suatu alternatif “mendominasi” atau “didominasi” oleh alternatif lainnya. Suatu alternatif mendominasi ketika melakukan kinerja lebih baik daripada alternatif yang lain setidaknya pada satu kriteria dan tidak lebih buruk pada kriteria lainnya, sedangkan didominasi terjadi jika suatu alternatif melakukan kinerja lebih buruk daripada alternatif yang lain setidaknya pada satu kriteria dan tidak lebih baik pada kriteria lainnya (Hersh, 2006). Dengan mempertimbangkan preferensi pengambil keputusan, metode ini mampu mengantisipasi adanya *bounded rationality* dan *incomplete information* yang dihadapi oleh pengambil keputusan dalam hal informasi, kemampuan kognitif dan waktu Bouyssou dan Perny (1992).

Dibandingkan dengan metode analisis multikriteria yang lain, PROMETHEE merupakan metode yang efisien dengan memberikan interpretasi langsung dari parameter dan hasil analisis sensitivitas

(Amponsah *et al.* 2012; Al-Rashdan *et al.* 1999; Goumas dan Lygerou, 2000). Selain itu, PROMETHEE juga menawarkan konsep dan aplikasi yang sederhana, fleksibel, hasilnya stabil, interpretasinya mudah, serta dapat digunakan untuk mengolah data baik kuantitatif, kualitatif maupun data stokastik (Schwartz dan Göthner, 2009 sebagaimana dikutip oleh Şehitoğlu dan Özdemir, 2013), sedangkan menurut Huylenbroeck (1995) gabungan antara pendekatan fungsi preferensi ELECTRE dan PROMETHEE akan menghasilkan sebuah kerangka kerja yang komprehensif untuk pengambilan keputusan multikriteria yang dapat diterapkan untuk semua jenis masalah baik pada data ordinal atau kardinal.

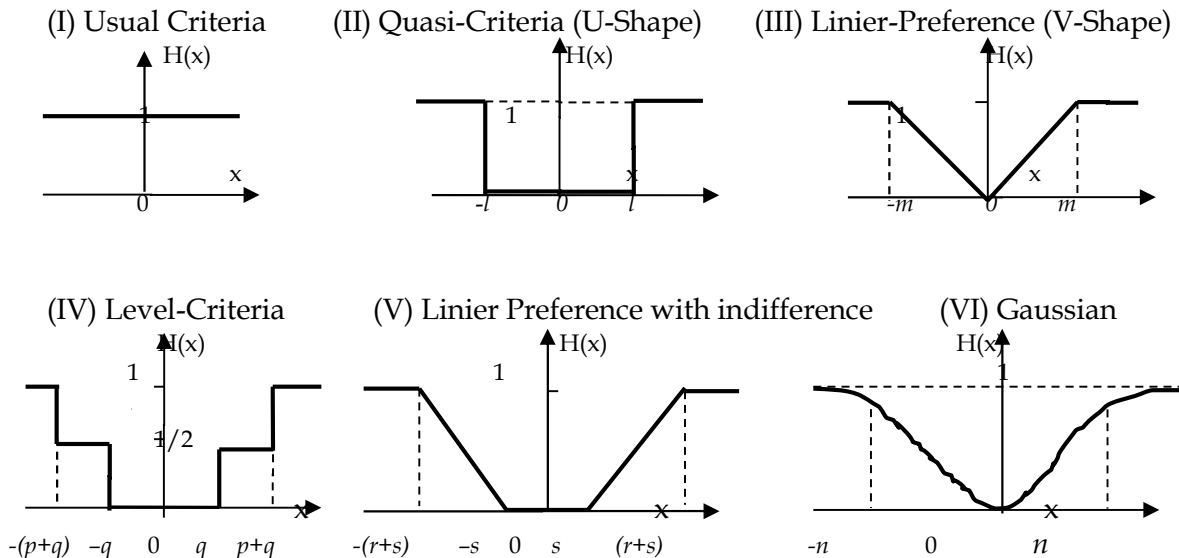
Sebagai pendekatan pengambilan keputusan, PROMETHEE menggunakan kriteria dan skala ukuran yang relevan berdasarkan preferensi pembuat keputusan. Menurut Brans dan Vinke (1985), Hersh (2006) terdapat enam jenis fungsi preferensi mewakili preferensi pengambil keputusan sebagaimana pada Gambar 2. Penentuan tipe preferensi menggambarkan kesesuaian pemilihan parameter yang dicerminkan dalam dua nilai-nilai ambang batas, yaitu: *indifference threshold* dan *preference threshold* (Figuera, Yose, et al, 2005 dalam Wimmmler *et al.* 2015). *Indifference threshold* menggambarkan penyimpangan terbesar antara dua alternatif yang oleh pembuat keputusan dianggap diabaikan, sedangkan *preference threshold* mewakili penyimpangan terkecil antara dua alternatif yang dianggap cukup oleh pembuat keputusan untuk menghasilkan preferensi mutlak (Kangas dan Pykäläinen, 2001 dalam Şehitoğlu dan Özdemir, 2013).

Secara matematis, urutan peringkat pada metode PROMETHEE didasarkan pada besarnya nilai aliran keluar (*leaving flow/ Φ^+*) dan aliran masuk (*entering flow/ Φ^-*) (Fauzi, 2015). *Leaving flow* menggambarkan keunggulan alternatif, sementara *entering flow* menggambarkan kelemahan alternatif. Berdasarkan kedua aliran tersebut diper-

oleh dua tipe peringkat yaitu *partial preorder* dan *complete preorder*.

Partial preorder atau disebut PROMETHEE I menyatakan bahwa suatu alternatif merupakan alternatif yang lebih baik dibandingkan alternatif lain jika mempunyai aliran keluar lebih tinggi dan aliran masuk

lebih rendah, namun pada kondisi tertentu dapat terjadi *indifference* yaitu jika arus preferensi *leaving flow* dan *entering flow* keduanya sama, dan dalam beberapa kasus aliran preferensi ini tidak selalu menghasilkan informasi yang konsisten (Brans *et al.*, 1986).



Gambar 2
Tipe-tipe Kriteria PROMETHEE

Sumber: Brans dan Vinke (1985); Brans, *et al.* (1986); Hersh, 2006

Menyadari adanya kemungkinan inkonsistensi tersebut, maka terdapat PROMETHEE II (*complete preorder*), yang didasarkan pada net flow (Φ_n), yaitu selisih antara leaving flow (Φ^+) dan aliran masuk (Φ^-). Φ_n yang lebih tinggi menggambarkan alternatif yang lebih baik. PROMETHEE II akan menghasilkan pemeringkatan yang lengkap dan memvisualisasikan urutan seluruh alternatif sehingga jelas alternatif mana yang mendominasi dan yang didominasi.

Brans *et al.* (1986) menyadari bahwa terdapat kemungkinan bagian informasi relevan yang cukup banyak hilang ketika menentukan *net flow* yang akan mempengaruhi hasil keputusan. Untuk mengatasi persoalan ini ia merekomendasikan untuk menerapkan PROMETHEE I dan PROMETHEE II secara bersamaan guna menentukan keputusan yang tepat.

Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang program pengentasan kemiskinan pemerintah, zakat dan CSR telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu. Beberapa penelitian-penelitian tersebut dapat dijadikan sebagai rujukan untuk menegaskan pentingnya penelitian ini dilakukan. Beik (2009) dalam penelitiannya menyatakan bahwa zakat merupakan salah satu solusi alternatif dalam mengurangi kemiskinan, namun, potensi dana yang besar dan peningkatannya dari tahun ke tahun yang cukup baik tidak disertai dengan realisasi dalam pengumpulannya (kurang dari 0,02% dari potensi zakat yang ada) sehingga mengurangi kemampuannya dalam memerangi kemiskinan. Salah satu penyebab dari hal ini adalah banyak diantara masyarakat yang masih mempertahankan pola penyaluran zakat secara tradisional yaitu penyaluran zakat secara

langsung tanpa melalui lembaga zakat.

Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada (2013) dalam penelitiannya yang berjudul Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Indonesia menyatakan bahwa program pengentasan kemiskinan memperagakan model kebijakan yang tidak koordinatif dan parsial, baik dalam hal aturan, acuan, kriteria penerima manfaat, dan pengelolannya. Implementasi program pengentasan kemiskinan masih memperlihatkan adanya ego sektoral, *overlapping*, ambiguitas, konflik struktural, dan memicu konflik horisontal di kalangan masyarakat.

Penelitian yang dilakukan oleh Muktasam dan Nurjannah (2011) yang berjudul Kajian Kritis Atas Fenomena Dan Program Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Hutan Di Pulau Lombok menyatakan bahwa program-program pengentasan kemiskinan pemerintah sebagian besar tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan gagal. Faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan program diantaranya: tidak ada kegiatan pemantauan, tidak dilanjutkan setelah proyek selesai, tidak ada pembinaan, pengelolaan program kurang optimal, mental pengelola tidak serius membantu, tidak ada hasilnya.

METODE PENELITIAN

Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini berupa 3 pola program pengentasan kemiskinan, yakni pola program pemerintah meliputi 11 program, terdiri dari: Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Jaminan Kesehatan (Jamkesmas), Program Bantuan Operasi Sekolah (BOS), Program Bantuan Siswa Miskin (BSM), serta PNPM Perdesaan, PNPM Perkotaan, Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), PNPM Generasi, dan PNPM Pariwisata. Pola kedua adalah pola program zakat, terdiri dari program-

program zakat Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), program-program zakat Lembaga Amil Zakat (LAZ) Dompot Dhuafa, program-program zakat Majelis Amil Zakat (MAZ) Baitussalam dan CSR terdiri dari program CSR PT.Antam, Tbk dan program CSR PT. Pertamina, Tbk.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, sebagai berikut: (1) diskusi mendalam secara berkelompok dengan metode *world cafe*. Dipandu seorang fasilitator, 24 orang peserta yang terdiri dari pengelola program zakat, konsultan CSR, dosen dan mahasiswa program pascasarjana, berkontribusi dalam diskusi tentang kondisi upaya pengentasan kemiskinan dan criteria evaluasi program pengentasan kemiskinan. Secara berkala peserta berpindah dari suatu meja ke meja yang lain. Perpindahan berlangsung dalam tiga putaran. Perpindahan ini memungkinkan diskusi berlangsung secara silang dan berkembang. Pada sesi akhir, ide-ide utama dan kemungkinan tindak lanjutnya dibahas dan disampaikan dalam forum pleno; (2) wawancara mendalam dengan pengelola program pemerintah, program zakat dan program CSR serta penerima program; (3) melakukan observasi proses pelaksanaan program.

Dari data yang cukup beragam tersebut kemudian diekstraksi untuk memperoleh gambaran yang lebih aktual tentang pelaksanaan pengelolaan program pengentasan kemiskinan eksisting. Untuk keperluan analisis, data hasil ekstraksi kemudian diskoring dengan menggunakan skala kualitatif lima poin (sangat baik-buruk). Hasil skoring menjadi masukan (*entry*) pada *software* PROMETHEE.

Kriteria Evaluasi

Kriteria evaluasi terhadap pola program pengentasan kemiskinan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari sembilan atribut meliputi aspek input, proses dan output. Kriteria pada aspek

input adalah: kualitas data, ketersediaan dana serta kelengkapan program. Kriteria pada aspek proses berupa: rata-rata waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan orang miskin dari kemiskinannya (*time to exit from poverty*), biaya pengelolaan dan manajemen. Kriteria pada aspek output meliputi: ketepatan sasaran, kepuasan penerima program terhadap waktu penyerahan program dan kepuasan penerima program terhadap proses penerimaan program.

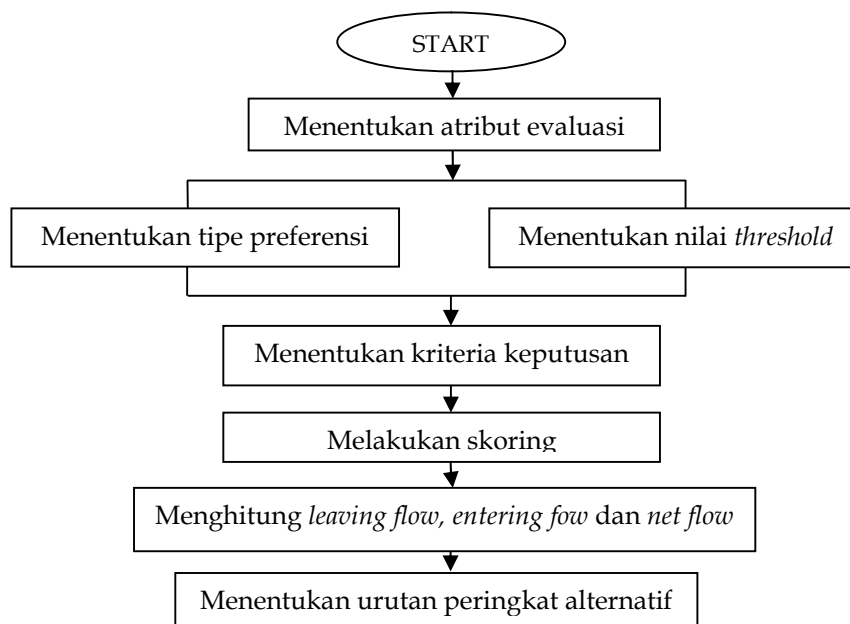
Sesuai prosedur metode PROMETHEE, pada setiap kriteria evaluasi ditetapkan fungsi preferensi dan nilai ambang batas (*threshold*). Mengingat ketersediaan data yang bersifat kualitatif, maka dari ke 6 tipe preferensi hanya tipe “linier” dan “usual” yang digunakan. Guna mendukung proses pengambilan keputusan selanjutnya di-

tetapkan kriteria untuk menetapkan arah tujuan keputusan apakah dimaksimumkan atau diminimumkan. 2 kriteria yaitu waktu yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan dan biaya pengelolaan dinilai dengan kriteria minimum, 7 kriteria yang lain dinilai dengan kriteria maksimum. Gambar 3 menunjukkan entry pada software PROMETHEE yang merangkum hasil skoring, kriteria evaluasi dan fungsi preferensi yang digunakan dalam penelitian ini. Selain ketiga pola program eksisting juga dinilai pola model hybrid sebagai pembandingan.

Secara lengkap tahapan analisis pemeringkatan pola program pengentasan kemiskinan menggunakan metode PROMETHEE sebagaimana pada gambar 4.

Scenario 1	Ketersediaa...	Ketersediaa...	Kelengkapan...	Waktu peng...	Biaya Pengel...	Manajemen	Ketepatan s...	Kepuasan th...	Kepuasan te...
Unit	5-point	5-point	5-point	5-point	5-point	point	5-point	5-point	5-point
Cluster/Group	◆	◆	◆	■	■	■	●	●	●
Preferences									
Min/Max	max	max	max	min	min	max	max	max	max
Weight	6,25	12,50	6,25	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33	8,33
Preference Fn.	Usual	Usual	Usual	Linear	Usual	Usual	Usual	Usual	Usual
Thresholds	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute	absolute
- Q: Indifference	n/a	n/a	n/a	0,30	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
- P: Preference	n/a	n/a	n/a	1,00	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
- S: Gaussian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Statistics									
Minimum	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Maximum	4,00	5,00	4,00	5,00	5,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Average	2,75	3,50	3,50	3,25	2,75	3,50	3,00	3,25	3,25
Standard Dev.	0,83	1,12	0,87	1,30	1,30	0,87	1,00	0,83	0,83
Evaluations									
<input checked="" type="checkbox"/> PROG.PEMERINT...	<input type="checkbox"/>	2,00	4,00	4,00	4,00	5,00	bad	bad	bad
<input checked="" type="checkbox"/> Zakat	<input type="checkbox"/>	3,00	2,00	4,00	2,00	2,00	good	good	good
<input checked="" type="checkbox"/> CSR	<input type="checkbox"/>	2,00	3,00	2,00	5,00	2,00	good	bad	average
<input checked="" type="checkbox"/> Hybrid	<input type="checkbox"/>	4,00	5,00	4,00	2,00	2,00	good	good	good

Gambar 3
Entri PROMETHEE Evaluasi Pola Program Pengentasan Kemiskinan Pemerintah, Zakat, CSR dan Model Hybrid



Gambar 4
Tahapan Analisis Metode Promethee

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

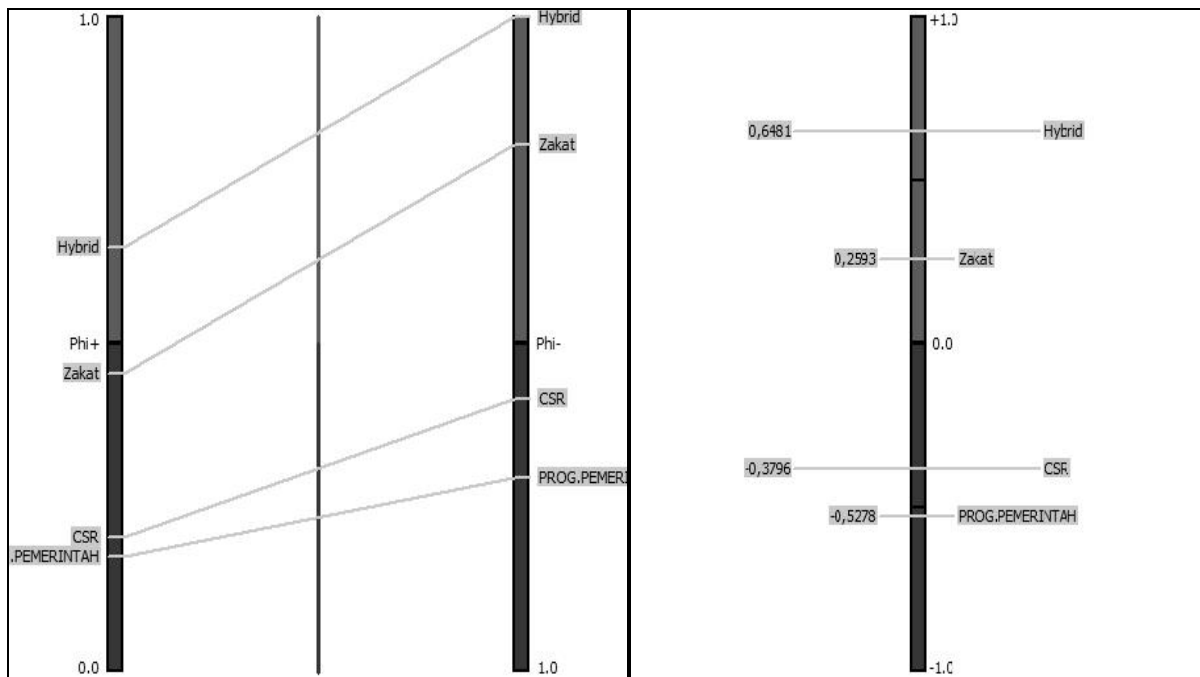
Urutan Peringkat Pola Program Pengentasan Kemiskinan

Hasil analisis perbandingan antara pola program pemerintah, pola zakat, pola CSR dan pola model *hybrid* menghasilkan *partial ranking* sebagaimana pada Gambar 5. Pada bar sebelah kiri (Gambar 5 sebelah kiri) menunjukkan urutan peringkat pola program berdasarkan Φ^+ (*leaving flow*) sedangkan bar sebelah kanan menunjukkan urutan peringkat berdasarkan Φ^- (*entering flow*). Atas dasar kedua aliran tersebut, hubungan dominasi preorder parsial (PROMETHEE I) dapat diketahui. Analisis pada Φ^+ menunjukkan bahwa pola model *hybrid* berada pada peringkat teratas disusul oleh pola zakat, pola CSR pada urutan berikutnya dan disusul kemudian oleh pola program pemerintah pada peringkat terakhir. Analisis pada Φ^- menunjukkan urutan tersebut tidak mengalami perubahan. Temuan ini menunjukkan kekuatan dari pola model *hybrid* yang mendominasi pola program lainnya.

Urutan peringkat pada PROMETHEE I didukung pula oleh hasil analisis PROMETHEE II (*complete preorder*). Urutan peringkat

pada PROMETHEE II yang didasarkan pada *net flow*, menjadi kompromi terbaik (*best-compromise solution*) dalam menentukan pemeringkatan. Dari analisis *net flow* diketahui pola model *hybrid* merupakan pola yang mempunyai nilai Φ^n paling besar dibandingkan dengan pola program lainnya. Dari temuan ini maka, pola model *hybrid* mendominasi program lainnya. Sementara, pola program zakat berada pada urutan kedua, disusul kemudian oleh pola CSR pada peringkat ke tiga, dan pola program pemerintah yang memiliki *net flow* terendah berada pada peringkat terakhir. Hasil analisis PROMETHEE II menggambarkan bahwa pola model *hybrid* adalah pola program terbaik dibandingkan dengan pola zakat, pola CSR maupun model pemerintah.

Metode PROMETHEE merupakan metode pengambilan keputusan yang komprehensif, selain menentukan hubungan *out-ranking*, juga memberikan ilustrasi tentang kriteria yang menjadi sumber keunggulan dan kelemahan masing-masing pola program. Untuk mengetahui kriteria yang menjadi sumber keunggulan dan kelemahan pola program disajikan Gambar 6.

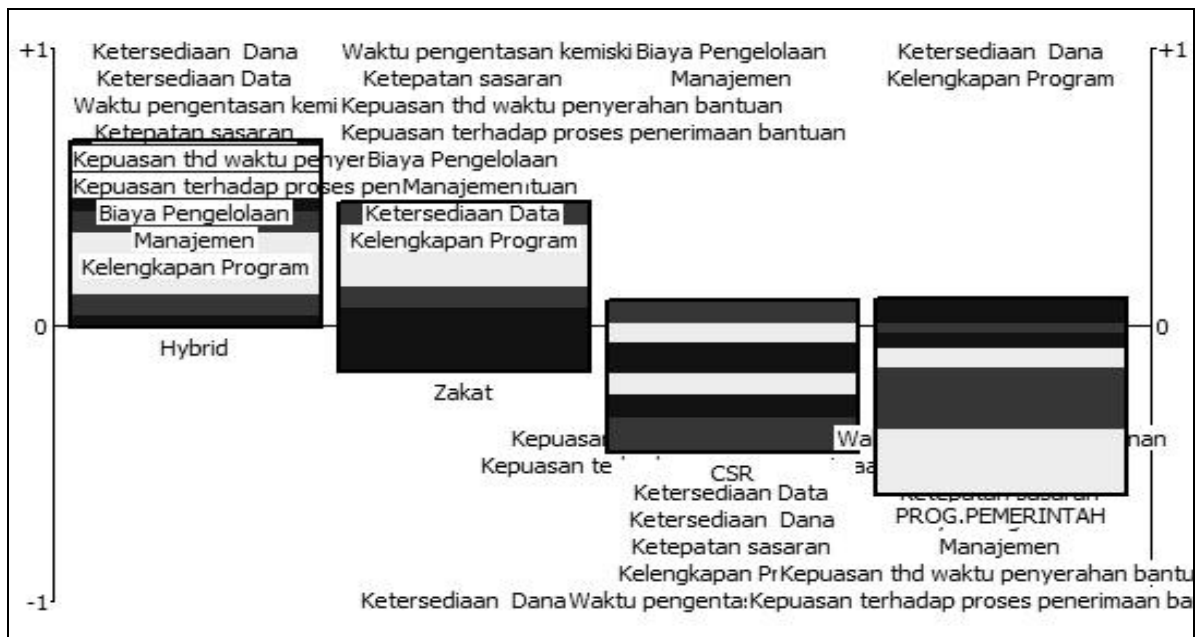


Gambar 5
Partial Ranking dan Complete Ranking

Gambar 6 menunjukkan bahwa pola program zakat memiliki keunggulan hampir pada seluruh kriteria evaluasi kecuali pada kriteria ketersediaan dana. Keunggulan pola zakat kemungkinan disebabkan oleh aturan agama yang telah mengarahkan dengan jelas target penerima zakat serta mekanisme pembagian zakat sehingga berdampak terhadap efektivitas manajemen, efisiensi dalam biaya pengelolaan serta waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan mustahik (penerima zakat) dari kemiskinannya. Kelemahan dalam hal dana sangat mungkin disebabkan oleh masih banyaknya pembayar zakat yang membayar zakatnya secara langsung kepada penerima tanpa melalui lembaga zakat. Temuan tentang kelemahan pola zakat ini menguatkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Beik (2009).

Pola CSR yang berada pada urutan ketiga unggul pada kriteria biaya pengelolaan dan manajemen. Keunggulan pola CSR kemungkinan disebabkan oleh budaya organisasi sektor swasta yang efisien serta

kinerja manajemen yang baik. Pada kriteria lainnya, yaitu: ketersediaan dana, waktu yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran, dan kelengkapan program. Kelemahan program CSR kemungkinan disebabkan oleh kebutuhan untuk program CSR di wilayah *remote* yang relatif besar dibandingkan dengan ketersediaan dana yang relatif terbatas, sehingga mempengaruhi kualitas serta ragam program yang dirancang. Kelemahan pada kriteria waktu pengentasan yang diperlukan untuk pengentasan kemiskinan serta ketepatan sasaran, sangat mungkin disebabkan oleh fokus perhatian perusahaan terhadap isue pengentasan kemiskinan yang relatif masih rendah pada lembaga perusahaan, terkesan hanya memenuhi aturan dan perundangan meskipun ada potensi peningkatan kesadaran dari waktu ke waktu. Pendistribusian program CSR hanya kepada calon penerima yang menyerahkan proposal saja, juga menjadi alasan kuat rendahnya kinerja CSR pada ketepatan sasaran.



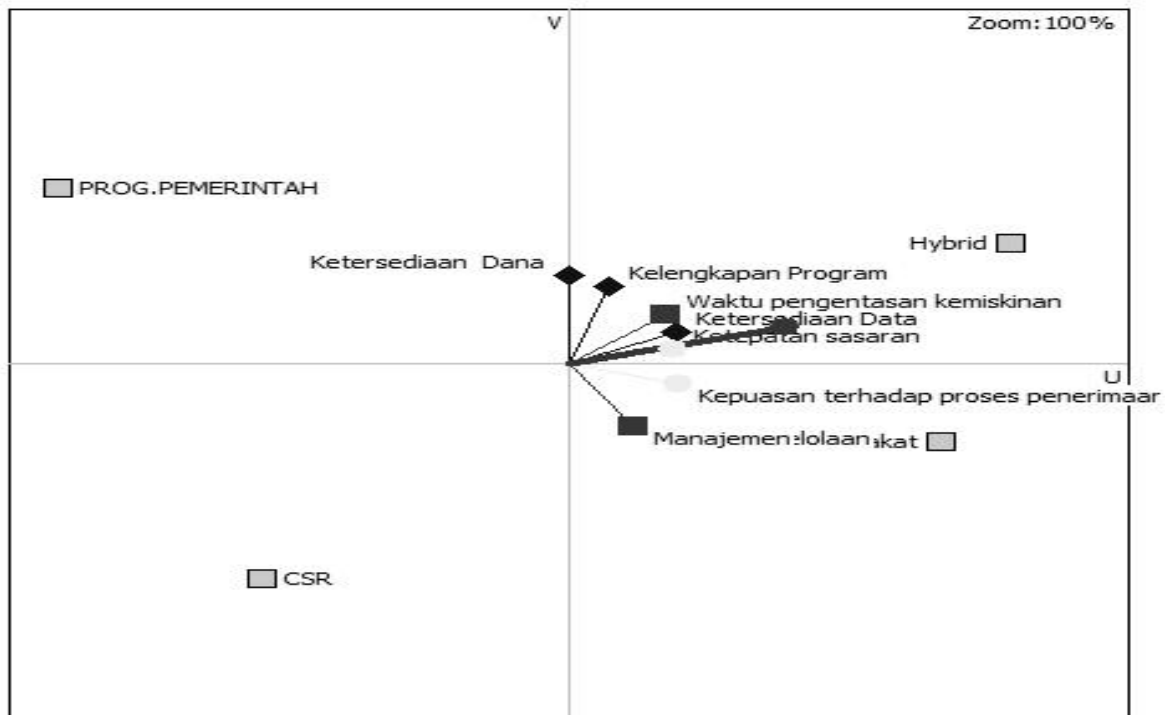
Gambar 6
Kontribusi Atribut yang Menentukan Kinerja Program Pengentasan Kemiskinan

Pola program pemerintah mempunyai keunggulan dalam kriteria kelengkapan program dan ketersediaan dana. Keunggulan pola program pemerintah kemungkinan terutama disebabkan oleh ketersediaan anggaran belanja negara untuk pengentasan kemiskinan yang cukup besar sehingga dapat dirancang berbagai program yang sangat lengkap. Sementara itu beberapa atribut menjadi sumber kelemahan program pemerintah yaitu: biaya pengelolaan, manajemen, ketepatan sasaran, kepuasan terhadap waktu penyerahan program, kepuasan terhadap proses penerimaan program, ketersediaan data, serta waktu yang diperlukan untuk mengeluarkan si miskin dari kemiskinan. Temuan ini menguatkan hasil-hasil penelitian terdahulu, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Pusat Studi Sosial Asia Tenggara Pusat Studi Perdesaan dan Kawasan Universitas Gadjah Mada, pada tahun 2013 dan Muktasam dan Nurjannah pada tahun 2011.

Pola model *hybrid* yang merupakan model kombinasi dari pola program yang ada (eksisting) memiliki keunggulan pada seluruh kriteria, yakni waktu pengentasan

kemiskinan yang cepat, ketersediaan data, ketersediaan dana, kelengkapan program, biaya pengelolaan, kepuasan terhadap waktu penyerahan program, manajemen, ketepatan sasaran, serta kepuasan terhadap proses penerimaan program. Temuan tentang keunggulan pola model *hybrid* ini sesuai dengan pernyataan para peneliti terdahulu tentang model *hybrid* yang menjadi alternatif terbaik model kelembagaan tatkala berhadapan dengan banyak aktor yang terlibat dalam penyelesaian permasalahan yang kompleks (German, 2010; Proff, 2015; Menard dan Shirley, 2014).

Gambar 7 selanjutnya memberikan gambaran opsi pola program dalam bidang tiga dimensi berdasarkan aksis kriteria. Seperti terlihat pada Gambar 7 tersebut, pola *hybrid* mempunyai keunggulan pada kriteria: kelengkapan program, waktu yang diperlukan dalam pengentasan kemiskinan, ketersediaan data, dan ketepatan sasaran, sedangkan pola program zakat yang berada dekat dengannya unggul pada kriteria kepuasan terhadap proses penerimaan program dan manajemen. Pola program zakat yang berada dalam kuadran



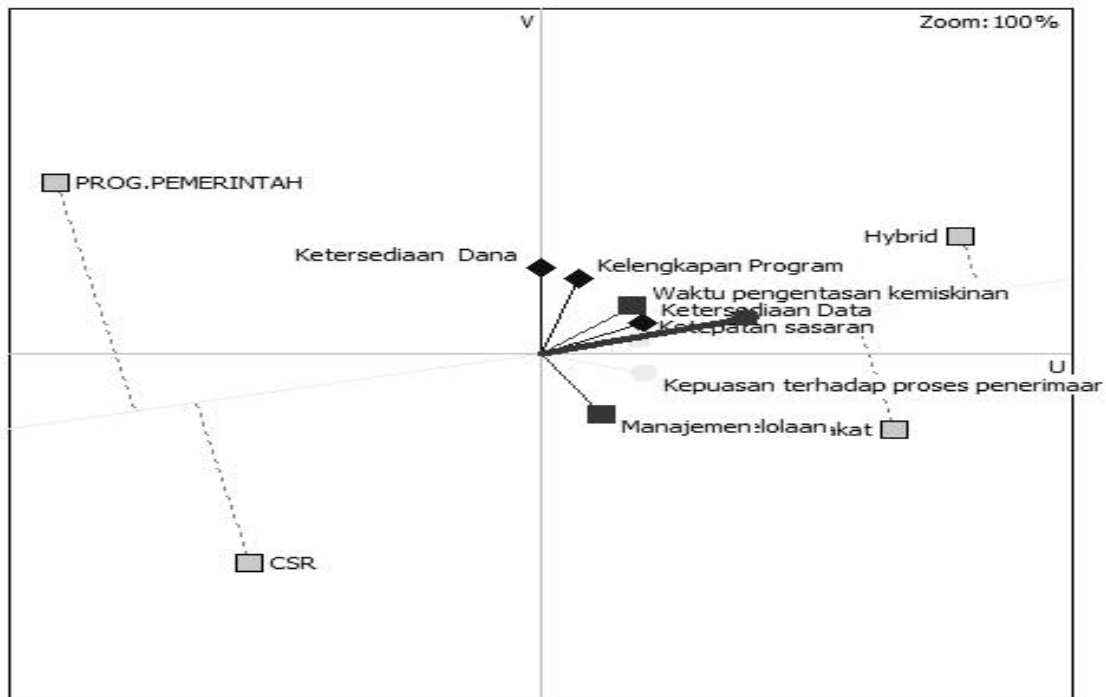
Gambar 7
Proyeksi Opsi Pengembangan Pola Program
Pengentasan Kemiskinan dalam Aksis Atribut

yang dekat dengan pola *hybrid* menunjukkan keduanya hampir memiliki karakter yang sama. Di sisi lain pola program pemerintah dan pola program CSR kurang berada dalam kluster yang sama. Pada kuadran dimana pola program pemerintah berada, terlihat kriteria ketersediaan dana menunjukkan sebagai sumber keunggulan, sementara pola program CSR pada analisa ini tidak mempunyai keunggulan. Hasil analisis ini dapat menjadi dasar bagi arah pengembangan model program pengentasan kemiskinan di masa yang akan datang.

Gambar 8 mempertegas posisi opsi terhadap proyeksi pengembangan program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Pada Gambar 8 terlihat pola *hybrid* lebih dekat pada proyeksi ketepatan sasaran dibandingkan jarak proyeksi yang jauh, sebagaimana pola program pemerintah maupun pola program CSR. Jarak proyeksi terdekat berikutnya adalah skema pola program zakat. Meskipun jarak pola program CSR relatif agak jauh dengan ke-

tepatan sasaran, namun dikarenakan pola manajemen yang baik, kesadaran yang semakin tinggi dari perusahaan terhadap tanggung jawab sosial, serta wilayah operasi yang relatif terbatas memungkinkan skema program dengan pola CSR akan lebih mudah menyesuaikan dalam merancang program yang tepat sasaran. Sementara untuk pola program pemerintah berada pada posisi yang berjarak paling jauh dengan aksis ketepatan sasaran sehingga dapat disimpulkan bahwa untuk menuju ke pola model *hybrid* memerlukan upaya yang cukup keras dibandingkan dengan pola lainnya agar berhasil.

Analisis selanjutnya untuk menunjukkan keunggulan masing-masing pola program, dilakukan dengan menggunakan peta RADAR sebagaimana terlihat pada Gambar 9, pola model *hybrid* hampir unggul pada seluruh criteria. Hal ini ditunjukkan oleh radar yang melebar ke luar. Pola program zakat unggul pada kriteria kelengkapan program, ketersediaan data, kepuasan ter-



Gambar 8
Proyeksi Opsi Program Pengentasan Kemiskinan
terhadap Krteria Ketepatan Sasaran

hadap waktu penyerahan program, waktu untuk pengentasan kemiskinan, ketepatan sasaran dan manajemen. Pola CSR unggul pada kriteria ketersediaan dana, manajemen dan kepuasan terhadap proses penerimaan program. Pola program pemerintah unggul pada kriteria ketersediaan dana, kelengkapan program, ketersediaan data dan ketepatan sasaran.

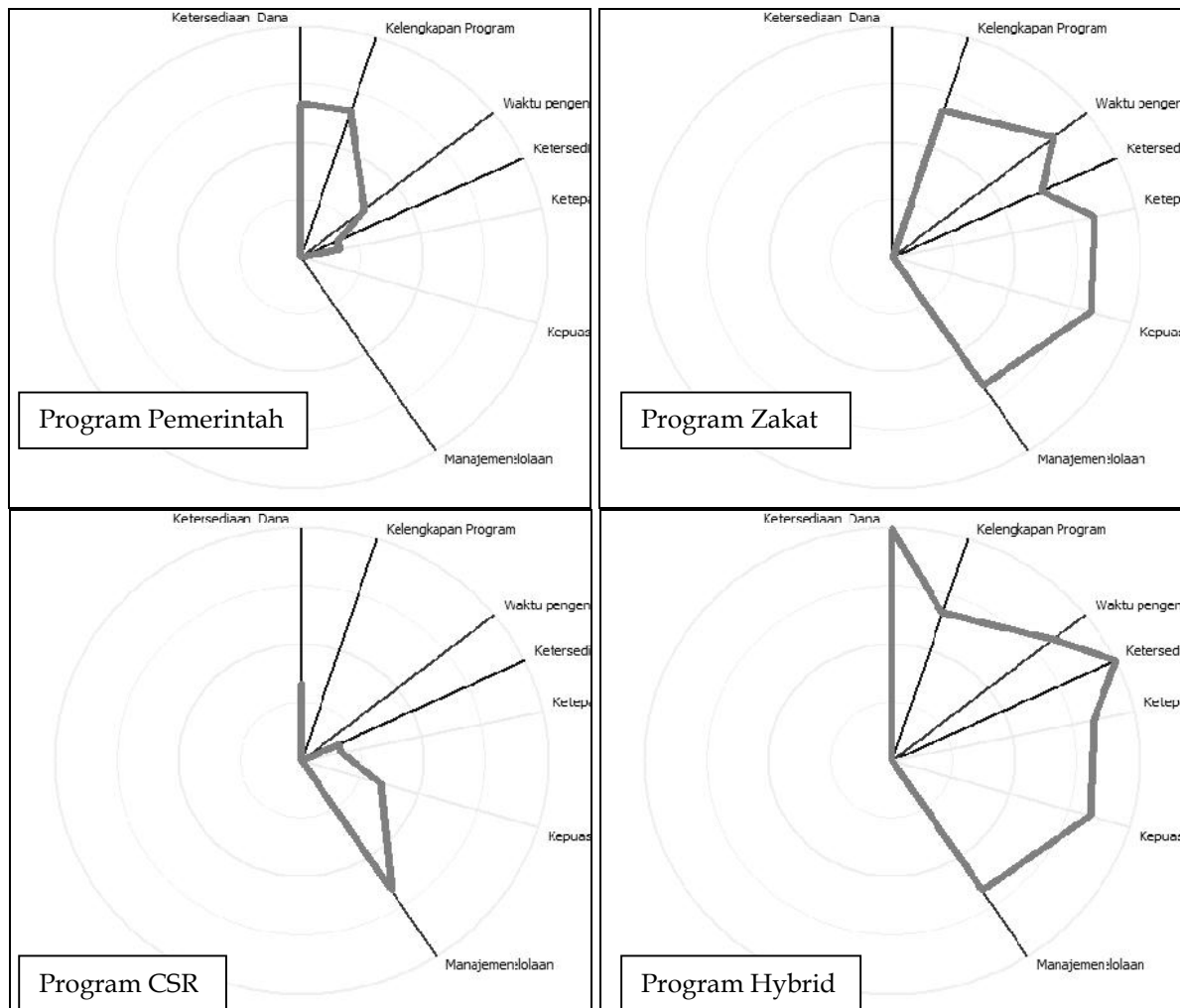
Analisis Sensitifitas

Bobot yang ditetapkan pada kriteria evaluasi mencerminkan prioritas pembuat keputusan. Mengingat tujuan yang berbeda, bobot pada satu kriteria dapat berbeda antara satu pembuat keputusan dengan pembuat keputusan yang lain. Metode PROMETHEE tidak memberikan pedoman khusus dalam penentuan bobot ini, namun adanya *bounded rationality* dan *incomplete information* pada pembuat keputusan dapat mengakibatkan hasil pemeringkatan menjadi kurang stabil. Dalam rangka menilai ketahanan hasil pemeringkatan yang diperoleh dari algoritma PROMETHEE perlu

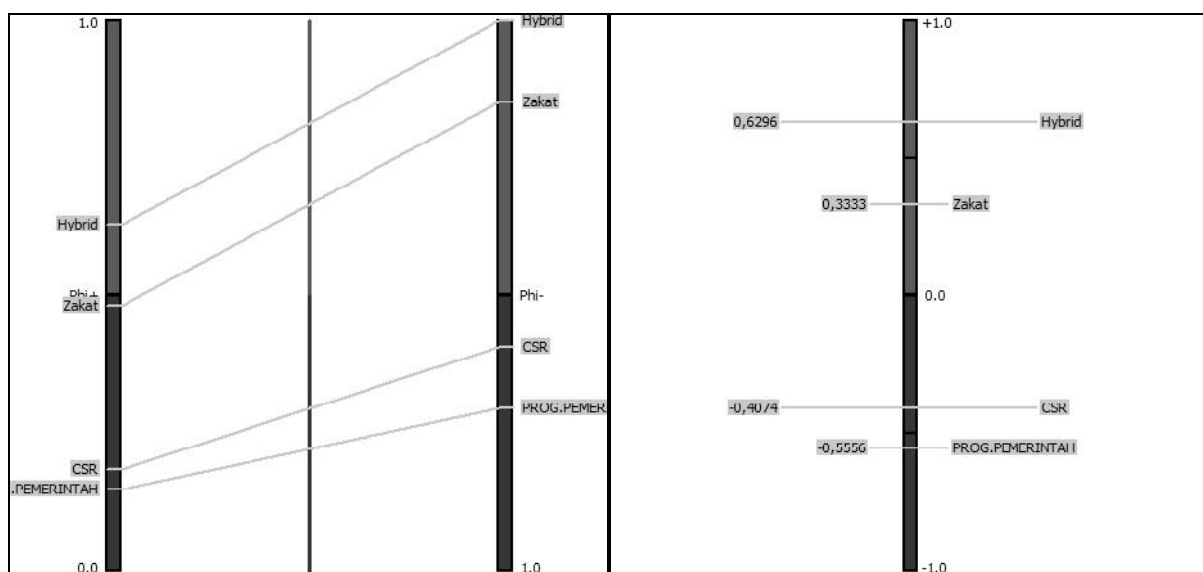
dilakukan uji sensitivitas (Schwartz dan Göthner, 2009 dalam Şehitoğlu, Y., Özdemir, O.C. 2013). Uji ini untuk mengetahui pengaruh variasi bobot kriteria pada hasil akhir pemeringkatan.

Hasil pemeringkatan dikatakan mempunyai ketahanan yang baik (*robust*) apabila variasi bobot tidak menyebabkan urutan peringkat mengalami perubahan.

Untuk menguji hasil pemeringkatan PROMETHEE II yang menggunakan bobot *walking weight (default)*, dilakukan manipulasi terhadap bobot kriteria dengan menggunakan bobot *equal*. Hasil pemeringkatan dengan perubahan bobot ini menunjukkan tidak adanya perubahan urutan hasil PROMETHEE II sebagaimana terlihat pada Gambar 10. Dengan demikian urutan peringkat pola program yang menetapkan pola *hybrid* pada urutan pertama, diikuti oleh pola zakat pada urutan kedua, pola CSR pada urutan ketiga dan pola program pemerintah yang berada pada urutan terakhir merupakan pemeringkatan yang *robust*.



Gambar 9
Peta Radar Pola Program dalam Aksis Atribut



Gambar 10
Perbandingan Hasil Urutan Pola Program dengan Bobot Kriteria Default dan Equal

SIMPULAN dan SARAN

Simpulan

Hasil pemeringkatan terhadap pola program pemerintah, pola zakat, pola CSR dan pola model *hybrid*, menempatkan pola *hybrid* berada pada peringkat pertama baik pada *partial ranking* maupun *complete ranking*. Temuan ini menunjukkan bahwa pola model *hybrid* yang merupakan model kombinasi dari berbagai pola program-program eksisting merupakan pola program pengentasan kemiskinan terbaik.

Pola model *hybrid* menunjukkan keunggulan pada seluruh aspek yang dianalisis. Dibandingkan dengan pola model *hybrid*, pola zakat lemah dalam aspek ketersediaan dana namun unggul pada seluruh aspek yang dianalisis. Pola program pemerintah hanya unggul pada kriteria ketersediaan dana dan kelengkapan program, sedangkan pola CSR unggul pada kriteria manajemen dan pencapaian target.

Hasil pemeringkatan ini memberi gambaran yang jelas bagi pengambil kebijakan bahwa pola pengentasan kemiskinan secara parsial yang dilaksanakan selama ini kurang menjamin efektivitas upaya pengentasan kemiskinan. Sebaliknya model *hybrid* yang merupakan perwujudan dari pola kombinasi dan partisipatif merupakan alternatif terbaik. Pola model *hybrid* akan menjamin terjadinya koordinasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan yang selama ini lemah. Penerapan pola model *hybrid* akan mewujudkan penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara terpadu dan berkelanjutan.

Saran

Berdasar pada simpulan penelitian, saran-saran sebagai implikasi dari penelitian ini terhadap kebijakan pengentasan kemiskinan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Menanggapi kemiskinan yang multidimensional, maka kriteria keberhasilan program pengentasan kemiskinan harus komprehensif. Tidak hanya meliputi kecukupan dan penyerapan anggaran

atau berkurangnya jumlah orang miskin, namun kebijakan yang terkait dengan aspek data dan kualitas program pada sisi input, aspek waktu yang diperlukan untuk mengentaskan kemiskinan, biaya pengelolaan serta manajemen pada sisi proses, serta aspek ketepatan sasaran, kepuasan terhadap waktu penerimaan program dan kepuasan terhadap proses penerimaan program menjadi variabel yang krusial untuk diaplikasikan. Dari sini, maka aspek hulu dari kebijakan menjadi penting sebagai indikator keberhasilan pengentasan kemiskinan.

Sebagaimana terlihat pada analisis metode Promethee, bentuk preferensi pengambilan keputusan akan berimplikasi pada perlunya semacam *threshold* atau ambang batas dalam penentuan kriteria evaluasi program pengentasan kemiskinan yang dapat ditoleransi baik oleh penyedia, pengguna maupun pengelola. Pola model *hybrid* sebagai pola terbaik memberikan implikasi terhadap pentingnya lembaga atau institusi alternatif yang dapat mensinergikan keunggulan-keunggulan dari pola program yang ada. Kebijakan yang mendorong pengembangan institusi ini harus diinisiasi oleh pemerintah pusat dengan *political will* dan politik anggaran yang kuat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyani, N., A. Fauzi., B. Juanda dan I. S. Beik. 2015. Evaluasi Program Pengentasan Kemiskinan Menggunakan Metode Rappoverty. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik* 6(2) :181-197.
- Ariyani, N., A. Fauzi., B. Juanda dan I. S. Beik. 2016. A Policy Scenario Modeling of Poverty Alleviation Program in Indonesia: An application of Promethee Method. *Issues in Business Management and Economics* 4(6): 54-62.
- Ali O. N. 2010. The Consequences of Zakat for Capital Accumulation. *Journal of Public Economic Theory* 12: 837- 856.
- Al'Rashdan, D., B. Al'Kloub., A. Dean dan T. Al'Shemmeri. 1999. Environmental Impact Assessment and Ranking the Environmental Projects in Jordan.

- European Journal of Operational Research* 118:30-45.
- Amponsah, S., F. Darkwah dan A.Inusah. 2012. Logistic Preference Function for Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE) Decision Analysis. *African Journal of Mathematics and Computer Science Research* 5(6): 112-119.
- Behzadian, M., R. B. Kazemzadeh., A. Albadvi dan M. Aghdas. 2010. PROMETHEE: A Comprehensive Literature Review on Methodologies and Applications. *European Journal of Operational Research* 200: 198-215.
- Beik, I.S. 2009. Analisis Peran Zakat dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompot Dhuafa Republika. *Jurnal Pemikiran dan Gagasan* II: 1-11.
- Bouyssou, D., dan P. Perny. 1992. Ranking Methods for Valued Preference Relations: A Characterization of a Method Based on Leaving and Entering Flows", *European Journal of Operational Research* 61: 186-194.
- BPS. 2015. Data Kemiskinan 2015. www.bps.go.id.
- Bradshaw, T. K. 2007. Theories of Poverty and Anti-Poverty Programs in Community Development. *Journal of the Community Development Society* 38(1): 7-25.
- Brans, J. P., P. Vincke. 1985. A Preference Ranking Organisation Method: (The PROMETHEE Method for Multiple Criteria Decision-Making). *Management Science Journal* 31(6): 647-656.
- Brans, J. P., P. Vincke dan B. Mareschal. 1986. "How to Select and to Rank Projects: The Promethee Method". *European Journal of Operational Research* (24): 228-238.
- Damilola, O. W., B. A. Nassir dan S. H. Baba. 2015. The Role of Zakat as A Poverty Alleviation Strategy and a Tool for Sustainable Development: Insight from The Perspectives of The Holly Prophet. *Arabian Journal of Business and Management Review* 5(3): 8-17.
- Dasgupta, P. 2007. Poverty Trap-Exploring the Complexity of Causation. 2020 Focus Brief on the World's Poor and Hungry People. <https://core.ac.uk/download/pdf/6345283.pdf>.
- Dobers, P. dan M. Halme. 2009. Corporate Social Responsibility and Developing Countries. *Corporate Social Responsibility and Environmental Management* 16(5): 237-249.
- Dolles, V. 2010. Analisis Kelembagaan Dalam Pengembangan Program Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota (Studi Kasus Penanggulangan Kemiskinan di Kota Depok). *Skripsi*. Insititut Pertanian Bogor.
- Fauzi, A. 2012. "Model Pemberdayaan Masyarakat". Paper disampaikan pada Seminar Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan: Bandung 27 September 2012.
- Fauzi, A. 2015. Pengembangan Rencana Bisnis Jasa Lingkungan Di Lombok Nusa Tenggara Barat. Paper disampaikan pada Seminar WWF: Lombok: 27 Mei 2015.
- German, L. A. 2010. "Hybrid Institution": Applications of Common Property Theory Beyond Discrete Tenure Regimes. *International Journal of the Commons* 4(1): 571-596.
- Goumas, M. dan V. Lygerou. 2000. An Extension of the PROMETHEE Method for Decision Making in Fuzzy Environment: Ranking of Alternative Energy Exploitation Projects. *European Journal of Operational Research* 123: 606-613.
- Huylenbroeck, G. V. 1995. The Conflict Analysis Method: Bridging the Gap Between ELECTRE, PROMETHEE and ORESTE. *European Journal of Operational Research* 81: 500-511.
- Hassan, M. K. dan J. M. Khan. 2007. Zakat, External Debt and Poverty Reduction

- Strategy in Bangladesh. *Journal of Economic Cooperation* 28(4): 1-38
- Hersh, M. 2006. *Mathematical Modelling for Sustainable Development*. Springer, Germany.
- Khan, A. U., A. Saboor dan Hussain, A. 2014. Investigating Multidimensional Poverty across the Regions in the Sindh Province of Pakistan. *Social Indicators Research* 119(2):515-532.
- Keyser, W., D. K dan P. Peeters. 1996. A Note on the Use of PROMETHEE Multicriteria Methods. *European Journal of Operational Research* 89: 457-461.
- Korankye, A. A. 2014. Causes of Poverty in Africa: A Review of Literature. *American International Journal of Social Science* 3(7):147-153.
- List, A. J. 2011. The Market for Charitable Giving. *Journal of Economic Perspectives* 25(2): 157-180.
- Mc Kague, K., D. Wheeler dan Karnani, A. 2015. *An Integrated Approach to Poverty Alleviation: Roles of the Private Sector, Government and Civil Society*. Springer International Publishing Switzerland.
- Menard, C. dan M. M. Shirley. 2014. The Future of New Institutional Economics: From Early Institution to a New Paradigm. *Journal of Institutional Economics* 10(4): 541-565.
- Mubarok, A. dan B. Fanani. 2014. Penghimpunan Dana Zakat Nasional (Potensi, Realisasi dan Peran Penting Organisasi Pengelola Zakat). *Permana* V(2): 7-16.
- Muktasam, M. dan S. Nurjannah. 2011. Kajian Kritis Atas Fenomena Dan Program Pengentasan Kemiskinan Pada Masyarakat Sekitar Hutan Di Pulau Lombok. *Laporan Penelitian*. LIPI. Jakarta.
- Pache, A. C and F. Santos. 2013. Inside the Hybrid Organization: Selective Coupling as a Response to Competing Institutional Logics. *Academy of Management Journal* 56(4): 972-1001.
- Proff, S. 2015. The Microeconomics of Complex Economies: Evolutionary, Institutional, Neoclassical, and Complexity Perspectives, by Wolfram Elsner, Torsten Heinrich, and Henning Schwardt. Oxford, UK: Academic Press, 2014. *Journal of Economic Issues* 49(1): 297-299.
- Pusat Studi Sosial Asia Tenggara-UGM. 2014. Evaluasi Efektivitas Program Pengentasan Kemiskinan di 15 Kabupaten/Kota di Indonesia. *Press Release*.
- Russell, S. 2011. *The Hybrid Economy Topic Guide*. Centre For Aboriginal Economic Policy Research. The Australian National University (ANU). <http://www.caepr.anu.edu.au/>
- Sameti, M., R. D. Esfahani dan H. K. Haghghi. 2012. Theory of Poverty: A Comparison Analysis. *Journal of Business and Management Review* 1(6):45-56.
- Şehitoğlu, Y., O. C. Özdemir. 2013. The Impact of Business Incubation on Firm Performance During Post Graduation Period-Turkey Example. *British Journal of Arts and Social Sciences* 12(1): 171-190.
- Shaffer, P. 2008. New Thinking on Poverty: Implications for Globalisation and Poverty Reduction Strategies. *Real World Economics Review* 47(3):192-231.
- Sharma, A., R. Kiran. 2013. Corporate Social Responsibility: Driving Forces and Challenges. *International Journal of Business Research and Development* 2(1):18-27.
- The Economist. 2008. *Special Report Corporate Social Responsibility*. Jan 17th 2008. The Economist-Print Edition.
- Wimmler, C., G. Hejazi., D. O. Fernandes., C. Moreira and S. Connors. 2015. Multi-Criteria Decision Support Methods for Renewable Energy Systems on Islands. *Journal of Clean Energy Technologies* 3(3): 185-195.